

Fenomena Golput Masyarakat Kabupaten Ttu Dalam Pemilihan UMUM Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Tentang Golput Di Dapil I Kec.Kota Kefamenanu dan Dapil IV Kec.Biboki Feotleu)

Filipus Fernando Amfotis¹, Rex Tiran², Boli Tonda Boso³

^{1,2,3}Uniersitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: nandoagen@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i2.115>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 26 Mei 2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 12 Juni 2026

Kata Kunci

Fenomena, Golput, Pemilu

Keywords

Phenomenon, Abstaining from Voting, Election.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena golongan putih (golput) pada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, dengan fokus pada Dapil I Kecamatan Kota Kefamenanu dan Dapil IV Kecamatan Biboki Feotleu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput di Kabupaten TTU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan dalam empat tipologi, yaitu golput teknis, golput teknis-politis, golput politis, dan golput ideologis. Golput teknis dominan terjadi di wilayah pedesaan akibat faktor pekerjaan, keterbatasan akses, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, di wilayah perkotaan ditemukan variasi golput yang lebih kompleks hingga pada tingkat ideologis yang dipengaruhi oleh sikap kritis dan ketidakpercayaan terhadap politik. Selain itu, tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan perbedaan antara wilayah kota dan desa. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat partisipasi yang lebih beragam, mulai dari apatis, spektator, hingga pengkritik aktif, sedangkan masyarakat pedesaan cenderung terbatas pada partisipasi apatis dan spektator. Temuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh kejenuhan politik pasca Pemilu Nasional, serta permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk pemilih yang berada di luar daerah dan data pemilih yang belum diperbarui. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan bahwa faktor mobilitas penduduk, kondisi kesehatan, serta kurangnya pembaruan data kependudukan turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput. memengaruhi perilaku politik masyarakat perkotaan dan pedesaan.

This study aims to describe and analyze the phenomenon of the white group (golput) in the community of North Central Timor Regency (TTU) in the 2024 Regional Head Election (Pilkada), with a focus on Electoral District I of Kota Kefamenanu District and Electoral District IV of Biboki Feotleu District. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the phenomenon of golput in TTU Regency is influenced by various factors that can be classified into four typologies, namely technical golput, technical-political golput, political golput, and ideological golput. Technical golput predominantly occurs in rural areas due to employment factors, limited access, and the socio-economic conditions of the community. Meanwhile, in urban areas, more complex variations of golput were found up to the ideological level which were influenced by critical attitudes and distrust of politics. In addition, the level of political participation of the community shows differences between urban and rural areas. Urban communities have more diverse levels of participation, ranging from apathy, spectators, to active

critics, while rural communities tend to be limited to apathetic and spectator participation. Findings from the General Elections Commission (KPU) show that the decline in voter participation in the 2024 Regional Elections was influenced by political saturation after the National Elections, as well as administrative problems such as data discrepancies in the Permanent Voter List (DPT), including voters who are outside the region and voter data that has not been updated. Meanwhile, the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) emphasized that factors such as population mobility, health conditions, and the lack of updating population data also contributed to the increase in the number of abstentions. influencing the political behavior of urban and rural communities.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang bertujuan memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota secara langsung oleh rakyat. Pilkada menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah karena melalui Pilkada masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi lokal. Secara normatif, pelaksanaan Pemilu telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak politik yang dijamin negara untuk memilih pemimpin daerahnya secara demokratis. Oleh karena itu, tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang representatif dan demokratis.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan Pilkada secara langsung sejak tahun 2005 hingga Pilkada tahun 2024. Dalam setiap pelaksanaannya, Pilkada di Kabupaten TTU mengalami berbagai dinamika politik dan tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah tingginya angka Golongan Putih (Golput) dalam beberapa periode Pilkada, khususnya pada Pilkada tahun 2024. Fenomena Golput merupakan salah satu persoalan dalam demokrasi karena menunjukkan adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum. Tingginya angka Golput sering dikaitkan dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap elite politik, kurangnya pendidikan politik, maupun faktor sosial ekonomi dan geografis. Dalam konteks Pilkada, tingginya angka Golput dapat mempengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih serta kualitas demokrasi lokal. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, tren Golput pada Pilkada mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Pilkada tahun 2015, angka Golput mencapai 44% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 167.886 pemilih. Tingginya angka Golput pada tahun tersebut dipengaruhi oleh kondisi Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal melawan kotak kosong sehingga masyarakat dinilai kurang memiliki alternatif pilihan politik. Selanjutnya pada Pilkada tahun 2020, angka Golput mengalami penurunan menjadi 23% dari total DPT sebanyak 172.385 pemilih. Penurunan tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat karena Pilkada diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah sehingga kompetisi politik menjadi lebih terbuka. Namun demikian, pada Pilkada tahun 2024 angka Golput kembali meningkat menjadi 33% dari total DPT sebanyak 193.902 pemilih. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 62.580 masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020, jumlah Golput mengalami peningkatan yang cukup besar. Kondisi ini menjadi menarik karena Pilkada tahun 2024 diikuti oleh empat pasangan calon kepala daerah, yang secara teoritis seharusnya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilih karena tersedianya lebih banyak alternatif pilihan politik. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, sehingga

mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memilih. Selain itu, berdasarkan data perbandingan Pilkada seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten TTU mencatat presentase Golput sebesar 33,31% dan menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten dengan angka Golput tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten TTU masih tergolong rendah dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat itu sendiri. Menurut August Mellaz, apabila angka Golput berada di atas 30%, maka diperlukan upaya peningkatan partisipasi memilih di daerah tersebut. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tingginya angka Golput di Kabupaten TTU menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Fenomena Golput di Kabupaten TTU juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat antarwilayah kecamatan. Berdasarkan data Pilkada tahun 2024, Kecamatan Biboki Feotleu menjadi kecamatan dengan presentase Golput tertinggi yaitu sebesar 38,38%, sedangkan Kecamatan Kota Kefamenanu memiliki angka Golput sebesar 26,44%. Tingginya angka Golput di beberapa kecamatan pedesaan menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh faktor geografis, aksesibilitas, tingkat pendidikan politik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Kota Kefamenanu cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih baik karena masyarakat memiliki akses informasi politik yang lebih luas. Perbedaan tingkat Golput antarwilayah tersebut menjadi dasar peneliti untuk memilih Kecamatan Biboki Feotleu dan Kecamatan Kota Kefamenanu sebagai lokasi penelitian. Kecamatan Biboki Feotleu dipilih karena memiliki angka Golput tertinggi di Kabupaten TTU, sedangkan Kecamatan Kota Kefamenanu dipilih sebagai wilayah pembanding dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024. Penelitian berjudul “Fenomena Golput Masyarakat Kabupaten TTU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024” penting dilakukan untuk memahami fenomena meningkatnya angka Golput di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain memberikan kontribusi akademik dalam kajian partisipasi politik masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat pada Pilkada di masa mendatang.

Penelitian pertama dilakukan oleh Agrifan Lede pada tahun 2023 dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Periode 2021–2024 (Studi Kasus Golput di Kecamatan Loli)” pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi politik dan munculnya golput pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi masyarakat memilih golput, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi faktor politik dan kurangnya sosialisasi politik, sedangkan faktor internal berkaitan dengan faktor teknis, pekerjaan, dan faktor psikologis yang menyebabkan masyarakat bersikap apatis terhadap sistem pemilihan yang ada. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terutama pada alur kerangka berpikir dan teori utama yang digunakan. Penelitian terdahulu menyesuaikan teori dengan konteks sosial politik masyarakat Sumba Barat, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang lebih relevan dengan fenomena golput masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pilkada tahun 2024. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu meneliti fenomena golput serta sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhamad Fadel Akbar pada tahun 2023 dengan judul “Fenomena Golput Dalam Pilkada (Studi Terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Dalam Pilkada Depok 2020)” pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena golput yang terjadi pada Pilkada Depok tahun 2020, khususnya di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput terjadi karena adanya stigma dan kekecewaan masyarakat terhadap pola politik yang pernah

terjadi sebelumnya sehingga menimbulkan trauma politik bagi sebagian masyarakat. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak suara serta kondisi sebagian masyarakat yang tidak berada di lokasi pemilihan saat pemungutan suara berlangsung juga menjadi faktor penyebab munculnya golput. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan pada kerangka berpikir dan teori yang digunakan. Setiap penelitian memiliki penyesuaian teori berdasarkan kebutuhan analisis dan konteks penelitian masing-masing. Namun demikian, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji fenomena golput dalam Pilkada serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Merkorius Tele pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020” pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya golput pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk golput pada Pilkada Kabupaten Ngada tahun 2020 terdiri dari golput teknis, golput politis, dan golput pragmatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi golput dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan faktor politik dan manfaat pemilu yang dirasakan masyarakat. Penelitian terdahulu ini memiliki pendekatan dan alur kerangka berpikir yang berbeda dengan penelitian penulis sehingga teori yang digunakan juga berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap penelitian memiliki karakteristik tersendiri dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Akan tetapi, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas fenomena golongan putih (golput) dalam pemilihan kepala daerah serta berfokus pada alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena golput dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor politik, pendidikan politik, pekerjaan, psikologis, sosial, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada fenomena golput masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pilkada tahun 2024 dengan melakukan perbandingan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, yaitu Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Biboki Feotleu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Golput Masyarakat Kabupaten TTU Pada Pilkada Tahun 2024 Golput Teknis

Golput teknis merupakan kondisi ketika masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kendala yang bersifat teknis atau situasional. Kendala tersebut dapat berupa pekerjaan, kondisi keluarga, aktivitas ekonomi, keterbatasan waktu, maupun hambatan geografis yang menyebabkan seseorang tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa golput teknis menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Helmina yang berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa di Kota Kefamenanu mengungkapkan bahwa:

“Pada hari pemungutan suara Pilkada 27 November 2024, saya tidak hadir di TPS. Saat itu saya memilih untuk melakukan perjalanan liburan bersama keluarga-keluarga saya, sehingga tidak sempat menggunakan hak pilih.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa ketidakhadiran dalam Pilkada disebabkan oleh aktivitas pribadi berupa perjalanan bersama keluarga yang dilakukan pada hari pemungutan suara. Informan sebenarnya tidak menunjukkan adanya sikap penolakan terhadap Pilkada ataupun ketidakpercayaan terhadap proses politik, melainkan lebih kepada ketidakmampuan membagi waktu antara aktivitas pribadi dengan pelaksanaan pemungutan suara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa golput terjadi karena faktor teknis yang bersifat situasional. Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Biboki Feotleu, khususnya di Desa Kuluan. Informan Ferrynandus Kima yang berusia 37 tahun dan berprofesi sebagai petani menyatakan bahwa:

“Saya tidak ikut memilih pada saat Pilkada tanggal 27 November 2024, karena pada hari itu saya lebih memilih pergi berkebun. Waktu itu sudah memasuki musim hujan, sehingga saya merasa lebih penting untuk mengurus kebun daripada datang ke TPS.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk tidak memilih. Musim hujan dianggap sebagai waktu penting bagi masyarakat petani untuk mengelola kebun sehingga aktivitas tersebut lebih diprioritaskan dibandingkan datang ke TPS. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kebutuhan ekonomi sehari-hari sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pekerjaan dan kondisi ekonomi dapat menjadi penyebab munculnya golput teknis. Selain itu, Informan Karolus Ua yang berusia 29 tahun dan bekerja sebagai aparat desa mengungkapkan bahwa:

“Waktu Pilkada tanggal 27 November 2024 itu saya tidak bisa ikut memilih, karena anak saya sedang sakit dan harus dibawa ke kota untuk dirawat. Sebenarnya bisa saja saya datang ke TPS, tapi adik tau sendiri akses jalan ke kota itu sulit jadi kita harus siap pagi-pagi kalau mau ke kota apalagi bawa anak yang sedang sakit, dan setelah sampai di kota anak juga harus rawat inap. Jadi saya tidak sempat ikut pencoblosan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa faktor keluarga dan kondisi geografis menjadi hambatan teknis dalam menggunakan hak pilih. Informan lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan anggota keluarga dibandingkan mengikuti proses pemungutan suara. Selain itu, sulitnya akses transportasi dari desa menuju kota juga memperkuat hambatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor infrastruktur dan aksesibilitas wilayah pedesaan turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya, Informan Herman Haki yang berusia 34 tahun menyatakan bahwa:

“Waktu Pilkada tanggal 27 November 2024 saya tidak ikut mencoblos, karena saat itu saya sedang bekerja di kota, di salah satu toko bangunan. Saya pikir kalau harus pulang itu butuh biaya lagi adik. Apalagi kalau hanya pulang satu hari saja, besoknya harus kerja lagi, pasti capek juga. Sekarang kebetulan saya sudah tidak bekerja di sana, jadi saya bisa balik kampung.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa faktor pekerjaan dan keterbatasan ekonomi menjadi penyebab utama ketidakhadiran di TPS. Informan mempertimbangkan biaya transportasi dan keterbatasan waktu untuk kembali ke daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas kerja masyarakat turut mempengaruhi partisipasi politik, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di luar daerah tempat tinggalnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Informan Yusuf Dupe yang berusia 42 tahun, yaitu:

“Pada saat Pilkada tanggal 27 November 2024, saya tidak datang ke TPS karena harus menjaga dan mengelola ternak di rumah. Saat itu kondisi di desa sedang rawan pencurian ternak, sehingga saya tidak bisa meninggalkan ternak dalam waktu lama. Selain itu, saya juga tidak terlalu mengikuti urusan politik, sehingga tidak terlalu memikirkan untuk ikut memilih.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor pekerjaan dan keamanan ekonomi, rendahnya ketertarikan terhadap politik juga turut mempengaruhi keputusan untuk tidak memilih. Informan lebih memprioritaskan menjaga ternak karena dianggap lebih penting dibandingkan mengikuti Pilkada. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran politik masyarakat masih dipengaruhi oleh kebutuhan praktis sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Helmina, Ferrynandus Kima, Karolus Ua, Herman Haki, dan Yusuf Dupe, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkada Kabupaten Ttu tahun 2024 termasuk dalam kategori golput teknis. Hal ini karena alasan tidak memilih didominasi oleh kendala situasional dan kebutuhan praktis sehari-hari seperti bepergian bersama keluarga, tuntutan pekerjaan, aktivitas berkebun pada musim hujan, kondisi anggota keluarga yang sakit, keterbatasan akses transportasi, serta faktor ekonomi. Para informan tidak menunjukkan adanya sikap penolakan terhadap Pilkada maupun ketidakpercayaan terhadap proses politik, melainkan lebih pada ketidakmampuan menyesuaikan kondisi agar dapat hadir di TPS. Dengan demikian, golput yang terjadi bersifat non-politis dan lebih dipengaruhi oleh faktor teknis, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.

Golput Teknis-Politis

Golput teknis-politis merupakan bentuk golput yang muncul akibat adanya hambatan teknis yang berkaitan dengan persoalan administratif dan rendahnya kesiapan individu dalam memenuhi prosedur pemilu. Dalam kondisi ini, pemilih sebenarnya memiliki keinginan untuk menggunakan hak pilihnya, namun terkendala oleh administrasi pemilu, minimnya informasi, maupun kurangnya inisiatif untuk

mengurus proses pemindahan memilih. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Mario Neonbeni yang berusia 22 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa menyatakan bahwa:

“Pada saat pemungutan suara Pilkada tanggal 27 November 2024, saya tidak dapat menggunakan hak pilih karena sedang berada di luar kota. Saat itu saya masih berkuliah di luar daerah tempat pencoblosan sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke daerah asal. Selain itu, saya juga tidak sempat mengurus administrasi untuk pindah memilih di lokasi domisili sementara, sehingga pada akhirnya saya tidak terdaftar dan tidak dapat memberikan suara, dan saya juga tidak tahu bagaimana proses pindah pemilih untuk saya yang sedang berkuliah di luar kota asal.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa hambatan utama yang dialami adalah persoalan administratif pemilu dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pindah memilih. Informan sebenarnya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun keterbatasan informasi dan tidak adanya pengurusan administrasi menyebabkan hak pilihnya tidak dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi mengenai mekanisme pindah memilih turut berpengaruh terhadap meningkatnya angka golput di kalangan mahasiswa yang berada di luar daerah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan Ijebi Falo yang berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa di Kota Kupang, yaitu:

“Pada hari pemungutan suara, saya tidak hadir di TPS karena sedang menempuh kuliah di luar kota yaitu di Kota Kupang terkhususnya di UNIKA. Hal tersebut membuat saya tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat asal, sementara saya juga tidak mengurus administrasi sebagai pemilih pindahan di Kota Kupang, saya pernah dengar soal Kabupaten TTU yang akan memobilisasi para pemilih yang berada diluar kota asal namun sepertinya informasi tersebut tidak di realisasikan atau saya yang kurang informasi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor teknis administratif menjadi penyebab utama ketidakhadiran informan di TPS. Namun, di balik alasan teknis tersebut terdapat unsur politis berupa sikap pasif terhadap mekanisme administrasi pemilu. Informan cenderung menunggu adanya fasilitas atau mobilisasi dari pemerintah daerah tanpa melakukan upaya mandiri untuk memastikan proses pindah memilih. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya kesadaran administratif politik di kalangan pemilih muda, khususnya mahasiswa yang berada di luar daerah asal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Mario Neonbeni dan Ijebi Falo, dapat disimpulkan bahwa golput yang mereka lakukan termasuk dalam kategori golput teknis-politis. Hal ini karena ketidakhadiran mereka dipengaruhi oleh hambatan administratif berupa status sebagai mahasiswa di luar daerah dan tidak terpenuhinya prosedur pindah memilih. Selain itu, terdapat unsur politis berupa rendahnya inisiatif dan minimnya pemahaman mengenai mekanisme administrasi pemilu. Dengan demikian, golput yang terjadi tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi politis yang berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Golput Politis

Golput politis merupakan bentuk tidak menggunakan hak pilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Golput jenis ini muncul karena masyarakat merasa tidak percaya terhadap partai politik maupun calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa Pilkada tidak mampu membawa perubahan nyata terhadap kehidupan mereka sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Rudi Yadi yang berusia 42 tahun dan berasal dari Kelurahan Kefamenanu Selatan menyatakan bahwa:

“Saya tidak ikut memilih waktu Pilkada tanggal 27 November 2024, karena saya sudah tidak percaya dengan partai maupun calon bupati. Menurut saya politik itu kotor, sering menghalalkan segala cara, dan para politisi biasanya hanya muncul saat Pilkada atau Pemilu saja. Selain itu, saya juga tidak percaya Pilkada bisa membawa perubahan. Politisi juga terasa jauh dari masyarakat, jadi buat apa saya memilih.”

Pernyataan informan menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap partai politik maupun kandidat kepala daerah. Informan memandang politik sebagai sesuatu yang negatif dan penuh kepentingan sehingga menimbulkan rasa apatis terhadap proses demokrasi. Selain itu, adanya anggapan bahwa Pilkada tidak membawa perubahan nyata memperlihatkan rendahnya legitimasi politik di mata masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa golput politis tidak lagi dipengaruhi oleh faktor teknis atau administratif, melainkan oleh sikap skeptis masyarakat terhadap sistem politik dan elite politik. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik dapat berdampak pada menurunnya

partisipasi politik dalam Pilkada. Kondisi ini juga menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dengan elite politik yang menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki keterikatan terhadap proses demokrasi lokal. Dengan demikian, golput politis dalam Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024 menunjukkan adanya kecenderungan apatisme politik masyarakat yang dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap partai politik, kandidat kepala daerah, dan efektivitas Pilkada dalam membawa perubahan sosial maupun pembangunan daerah.

Golput Ideologis

Golput ideologis merupakan bentuk penolakan terhadap pemilu yang didasarkan pada keyakinan atau pandangan ideologis tertentu. Golput jenis ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak menganggap demokrasi sebagai sistem yang sesuai dengan nilai, keyakinan, ataupun pandangan politik yang mereka anut. Penolakan tersebut dapat muncul karena alasan agama, pandangan politik alternatif, maupun ketidakpercayaan mendasar terhadap sistem demokrasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa golput ideologis juga terjadi pada sebagian masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pilkada tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Pedro Diaz yang berusia 20 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa mengungkapkan bahwa: “Saya tidak ikut memilih waktu Pilkada tanggal 27 November 2024, karena saya merasa Pilkada itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Bagi saya saat ini politik itu kotor, karena sering menghalalkan segala cara, apalagi maraknya praktik money politics. Selain itu, saya juga merasa bahwa demokrasi bukan pilihan yang tepat untuk menentukan pemimpin, sebab dalam praktiknya di Indonesia justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Harusnya mencoba alternatif sistem yang baru.”

Pernyataan informan menunjukkan adanya penolakan yang tidak hanya ditujukan kepada kandidat maupun penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Informan memandang bahwa demokrasi dalam praktik politik di Indonesia telah mengalami penyimpangan, terutama dengan adanya praktik politik uang dan perilaku elite politik yang dinilai menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap demokrasi sebagai mekanisme dalam menentukan pemimpin daerah.

Selain itu, informan juga menunjukkan adanya pandangan ideologis bahwa sistem demokrasi dianggap tidak mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Pernyataan mengenai perlunya “alternatif sistem yang baru” memperlihatkan adanya bentuk kritik terhadap sistem politik yang berlaku saat ini. Sikap tersebut menunjukkan bahwa golput yang dilakukan bukan lagi karena faktor teknis ataupun administratif, melainkan karena adanya keyakinan tertentu yang membuat informan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada. Fenomena golput ideologis ini menunjukkan adanya krisis legitimasi demokrasi di kalangan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dianggap tidak mampu menghasilkan perubahan nyata dapat memunculkan sikap apatis bahkan penolakan terhadap proses demokrasi. Jika kondisi ini terus berkembang, maka dapat berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Pedro Diaz, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadirannya dalam Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024 termasuk dalam kategori golput ideologis. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan kritis terhadap demokrasi dan sistem politik yang berlaku, serta keyakinan bahwa Pilkada tidak mampu menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Dengan demikian, golput yang dilakukan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis maupun ketidakpercayaan terhadap kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh penolakan terhadap sistem demokrasi secara lebih mendasar. Tipologi golput di Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Biboki Feotleu pada Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024 menunjukkan bahwa perilaku tidak memilih merupakan refleksi dari realitas sosial masyarakat yang kompleks. Faktor ekonomi, pekerjaan, kondisi kesehatan, keterbatasan akses informasi, persoalan administratif, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem politik saling mempengaruhi dalam membentuk keputusan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Golput teknis yang dominan ditemukan di wilayah pedesaan memperlihatkan bahwa masyarakat sering kali lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan aktivitas sehari-hari dibandingkan partisipasi politik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan, keterbatasan akses transportasi, serta situasi sosial yang mengharuskan masyarakat mendahulukan kebutuhan hidup dibandingkan hadir di TPS. Sementara itu, golput teknis-politis dan golput politis yang lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik juga dipengaruhi oleh persoalan administratif, kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu, serta menurunnya kepercayaan

masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat kepala daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara masyarakat dengan elite politik yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak memiliki keterikatan dengan proses demokrasi lokal. Selain itu, munculnya golput ideologis menunjukkan adanya bentuk penolakan yang lebih mendalam terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mempertanyakan efektivitas demokrasi dalam membawa perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, golput tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ketidakhadiran dalam pemilu, tetapi juga sebagai respons sosial dan politik masyarakat terhadap realitas demokrasi yang mereka alami.

Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten TTU Pada Pilkada Tahun 2024

Partisipasi Politik Apatis

Partisipasi politik apatis dipahami sebagai kondisi ketidakpedulian individu terhadap persoalan politik, di mana seseorang tidak menunjukkan perhatian maupun ketertarikan terhadap berbagai dinamika politik di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, sikap apatis politik dimaknai sebagai perilaku individu atau kelompok yang bersikap acuh terhadap proses politik sehingga tidak terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Helmina yang berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa di Kota Kefamenanu mengungkapkan bahwa:

“Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusan politik yang ada di sekitar. Menurut saya juga sosialisasi tentang pentingnya politik masih sangat kurang, apalagi bagi kami generasi muda. Karena itu, saya lebih memilih mengurus hal-hal lain daripada harus melibatkan diri dalam politik.”

Pernyataan informan menunjukkan adanya sikap tidak peduli terhadap persoalan politik di lingkungan sekitarnya. Rendahnya ketertarikan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi politik, khususnya kepada generasi muda, sehingga politik dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan informan lebih memilih fokus pada aktivitas pribadi dibandingkan terlibat dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada. Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan Ferrynandus Kima yang berusia 37 tahun dan berprofesi sebagai petani, yaitu:

“Saya tidak mengikuti dengan urusan politik di sekitar saya. Bagi saya, mau siapa pun yang terpilih tetap saja saya harus bekerja untuk bisa makan, jadi menurut saya tidak ada bedanya. Syukur semoga ada bantuan tapi kalau tidak juga kita urus kebun saja.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa informan memandang politik tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupannya. Informan lebih memprioritaskan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari dibandingkan mengikuti perkembangan politik. Sikap ini menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap dampak nyata politik menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap Pilkada. Selain itu, Informan Yusuf Dupe yang berusia 42 tahun juga mengungkapkan bahwa:

“Selain itu, saya juga tidak terlalu mengikuti urusan politik, karena menurut saya yang terpenting adalah bagaimana saya bisa mengurus pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya lebih fokus pada kegiatan di rumah dan pekerjaan saya, jadi tidak terlalu memikirkan soal pemilihan atau siapa yang terpilih.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan pekerjaan menjadi prioritas utama dibandingkan keterlibatan dalam politik. Informan lebih fokus pada aktivitas sehari-hari dan tidak merasa terdorong untuk mengikuti perkembangan politik maupun berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi masyarakat pedesaan turut mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Helmina, Ferrynandus Kima, dan Yusuf Dupe, dapat disimpulkan bahwa sikap yang mereka tunjukkan termasuk dalam kategori partisipasi politik apatis. Hal ini ditandai oleh rendahnya kepedulian dan minimnya ketertarikan terhadap isu serta proses politik. Pandangan bahwa politik tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari, ditambah dengan kurangnya pendidikan dan sosialisasi politik, menyebabkan para informan lebih memprioritaskan pekerjaan dan urusan pribadi dibandingkan keterlibatan dalam Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024. Dengan demikian, keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan konsekuensi dari sikap apatis terhadap politik.

Partisipasi Politik Spektator

Partisipasi politik spektator merujuk pada bentuk keterlibatan politik yang bersifat pasif. Individu dalam kategori ini tetap memiliki perhatian terhadap isu-isu politik, namun keterlibatannya terbatas pada aktivitas mengamati, mengikuti informasi politik, serta berdiskusi tanpa terlibat langsung dalam aktivitas politik yang lebih intens. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Ijebi Falo yang berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa mengungkapkan bahwa:

“Kalau soal politik, saya biasanya hanya sebatas menjadi penonton saja, misalnya membaca berita. Kadang-kadang saya juga berdiskusi tentang isu-isu politik dengan teman atau keluarga, tapi tidak sampai terlibat lebih jauh.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan tetap mengikuti perkembangan politik melalui berita dan diskusi ringan, namun tidak memiliki keterlibatan aktif dalam aktivitas politik. Informan hanya menempatkan diri sebagai pengamat terhadap dinamika politik yang terjadi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan Karolus Ua yang berusia 29 tahun dan bekerja sebagai aparat desa, yaitu:

“Sikap saya terhadap politik sejauh ini hanya sebatas mengamati melalui pemberitaan biasa kita lihat dari media sosial Facebook. Sesekali saya mendiskusikan isu-isu politik tersebut dengan keluarga maupun teman, tetapi tidak sampai ikut serta secara aktif.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama informan dalam mengikuti perkembangan politik. Meskipun demikian, keterlibatan informan tetap berada pada tingkat pasif karena hanya sebatas mengamati dan berdiskusi tanpa ikut serta dalam aktivitas politik secara langsung. Selain itu, Informan Mario Neonbeni yang berusia 22 tahun juga menyatakan bahwa:

“Sikap saya terhadap politik sebenarnya hanya lihat-lihat saja. Saya biasa membaca berita yang lewat di TikTok atau medsos yang lain dan sesekali berdiskusi juga. Tapi, kalau untuk kegiatan kampanye atau terjun langsung, saya memang tidak pernah ikut, atau demo-demo atau semacamnya.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa informan mengikuti isu politik melalui media sosial dan sesekali berdiskusi mengenai isu tersebut. Akan tetapi, informan tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan politik yang lebih aktif seperti kampanye maupun demonstrasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan Herman Haki yang berusia 34 tahun, yaitu:

“Kalau soal politik sebenarnya saya jarang berdiskusi. Paling kalau sudah masuk masa pemilu, sesekali saya bercerita dengan teman-teman kerja. Untuk mengkritik juga hampir tidak pernah, soalnya saya kurang mengikuti. Media sosial juga jarang saya pakai, karena handphone lebih sering saya gunakan hanya untuk komunikasi sehari-hari saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan politik informan sangat terbatas. Informan hanya sesekali membahas politik ketika memasuki masa pemilu dan tidak aktif mengikuti perkembangan politik melalui media sosial. Rendahnya penggunaan media sosial juga mempengaruhi terbatasnya akses informasi politik yang dimiliki informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Ijebi Falo, Karolus Ua, Mario Neonbeni, dan Herman Haki, dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan politik yang mereka tunjukkan termasuk dalam kategori partisipasi politik spektator. Hal ini ditandai dengan adanya perhatian terhadap isu politik tanpa keterlibatan aktif secara langsung. Para informan mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan media sosial serta melakukan diskusi ringan dengan lingkungan sekitar, namun tidak ikut dalam aktivitas politik yang lebih intens seperti kampanye, organisasi politik, ataupun demonstrasi. Dengan demikian, mereka lebih menempatkan diri sebagai pengamat dalam proses demokrasi.

Partisipasi Politik Pengkritik

Partisipasi politik pengkritik merupakan bentuk keterlibatan politik yang ditunjukkan melalui sikap aktif dalam menyampaikan kritik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan maupun kondisi politik yang ada. Bentuk partisipasi ini biasanya dilakukan melalui media sosial, diskusi publik, demonstrasi, penandatanganan petisi, maupun bentuk protes lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Informan Pedro Diaz yang berusia 20 tahun dan merupakan mahasiswa mengungkapkan bahwa:

“Saya biasanya mengikuti perkembangan politik dari media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dari situ saya sering berdiskusi dengan teman-teman, dan hasil diskusi tersebut membuat saya lebih sering menyampaikan kritik melalui media sosial. Kadang juga ada petisi-petisi yang saya ikut tandatangi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama informan dalam mengikuti perkembangan politik sekaligus mengekspresikan kritik terhadap isu-isu politik. Informan juga memanfaatkan ruang digital sebagai media partisipasi politik melalui penandatanganan petisi

daring. Hal ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi politik yang lebih aktif dibandingkan kelompok apatis maupun spektator. Selain itu, Informan Rudi Yadi yang berusia 42 tahun dan berasal dari Kelurahan Kefamenanu Selatan menyatakan bahwa:

“Kalau ada isu politik saya biasanya sering diskusi dengan teman-teman. Kritik juga biasanya saya sampaikan langsung ke teman yang kebetulan punya jabatan di pemerintahan. Tapi paling sering saya pakai media sosial untuk kritik, bukan hanya soal politik di TTU saja, kadang juga sampai isu-isu politik dunia internasional saya ikuti dan komentari.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa informan aktif mengikuti perkembangan politik baik di tingkat lokal maupun internasional. Informan tidak hanya berdiskusi mengenai isu politik, tetapi juga menyampaikan kritik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang cukup tinggi serta keberanian dalam mengekspresikan pandangan politik di ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Pedro Diaz dan Rudi Yadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik yang mereka tunjukkan termasuk dalam kategori partisipasi politik pengkritik. Hal ini ditandai oleh sikap aktif dalam menyampaikan kritik terhadap isu dan kebijakan politik melalui diskusi, media sosial, serta keterlibatan dalam petisi daring. Meskipun tidak selalu diwujudkan melalui jalur konvensional seperti keikutsertaan dalam partai politik atau organisasi politik, para informan tetap berperan aktif dalam proses politik melalui ruang digital sebagai sarana ekspresi politik dan kontrol sosial terhadap pemerintah maupun elite politik. Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Biboki Feotleu pada Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024 menunjukkan adanya pola keterlibatan politik yang beragam, yaitu partisipasi apatis, spektator, dan pengkritik. Perbedaan pola tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, serta akses informasi politik yang dimiliki masyarakat. Kelompok apatis umumnya muncul karena masyarakat merasa politik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kehidupan mereka serta rendahnya pendidikan politik yang menyebabkan isu demokrasi terasa jauh dari kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, kelompok spektator menunjukkan adanya kesadaran politik, tetapi keterlibatannya masih bersifat pasif dan terbatas pada aktivitas mengamati serta berdiskusi mengenai politik. Di sisi lain, kelompok pengkritik memperlihatkan bentuk partisipasi politik yang lebih aktif, khususnya melalui media sosial dan ruang digital sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap isu politik. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat Kabupaten TTU pada Pilkada tahun 2024 tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi informasi yang membentuk cara masyarakat memahami dan mengekspresikan keterlibatan politik mereka.

Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Fenomena Golput Pilkada Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Berkaitan dengan meningkatnya angka golput pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024, peneliti melakukan wawancara dengan Yohanes B.D. Saleh Funan selaku Anggota KPU Kabupaten TTU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Informan mengungkapkan bahwa:

“Berdasarkan data perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2020 dan 2024, terlihat adanya penurunan partisipasi yang berimplikasi pada meningkatnya angka golput. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kejenuhan masyarakat setelah sebelumnya mengikuti Pemilu Nasional pada Februari 2024, sehingga ketika kembali dimobilisasi untuk mengikuti Pilkada, antusiasme pemilih menurun. Kedua, permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana masih terdapat banyak pemilih yang secara administratif (de jure) tercatat sebagai pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara, namun secara faktual (de facto) berada di luar daerah pada hari pemungutan suara. Kondisi ini umumnya dialami oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah maupun para pekerja yang bekerja di luar TTU. Situasi tersebut berbeda dengan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, bertepatan dengan masa liburan, sehingga

tingkat partisipasi lebih tinggi. Selain itu, pada masa tersebut pandemi Covid-19 membuat banyak pemilih tetap berada di wilayah domisili sehingga lebih mudah untuk menggunakan hak pilih. Faktor lain terkait DPT adalah masih tercatatnya nama pemilih yang telah meninggal dunia, karena belum diurusnya akta kematian secara resmi. Hal ini menyebabkan nama mereka tetap ada dalam daftar pemilih, meskipun secara nyata tidak mungkin hadir pada saat pencoblosan.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa peningkatan angka golput pada Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat teknis maupun sosial. Faktor kejenuhan politik masyarakat setelah pelaksanaan Pemilu Nasional 2024 menjadi salah satu penyebab menurunnya antusiasme masyarakat untuk kembali mengikuti Pilkada. Selain itu, permasalahan administrasi kependudukan dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga menjadi persoalan penting, terutama karena banyak pemilih yang secara administratif masih tercatat sebagai warga TTU namun secara faktual berada di luar daerah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin tinggi belum diimbangi dengan mekanisme administrasi pemilih yang efektif. Akibatnya, banyak pemilih yang kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, masih tercatatnya pemilih yang telah meninggal dunia dalam DPT menunjukkan bahwa sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih belum berjalan optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan golput di Kabupaten TTU tidak hanya disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran politik masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan administratif dan dinamika sosial masyarakat modern.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga memiliki fungsi pencegahan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa, serta pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih. Terkait upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024, Informan Heppy Oktavia, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten TTU Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dalam Pilkada, kami (Bawaslu) melakukan berbagai tahapan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan secara formal melalui pertemuan dengan masyarakat, pemasangan baliho, maupun media sosial, tetapi juga secara langsung oleh jajaran pengawas kami di tingkat kecamatan dan desa. Para pengawas ini melaksanakan sosialisasi dengan cara door to door, membagikan leaflet, hingga memanfaatkan acara non formal seperti arisan atau kegiatan adat. Dengan cara itu, pesan tentang pentingnya menggunakan hak pilih bisa lebih mudah diterima masyarakat dibanding hanya mengandalkan sosialisasi formal saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten TTU berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendekatan formal maupun informal. Strategi sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui metode door to door dinilai lebih efektif karena mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelompok sosial tertentu. Selain itu, pemanfaatan kegiatan adat dan kegiatan sosial masyarakat memperlihatkan adanya pendekatan berbasis budaya lokal dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Selain itu, terkait faktor penyebab tingginya angka golput pada Pilkada Kabupaten TTU tahun 2024, Informan Roswita H.P. Taus, S.E selaku Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengungkapkan bahwa:

“Faktor penyebab golput itu misalnya ada pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tapi pada hari pemungutan suara tidak hadir di TPS. Ada juga yang sebenarnya sudah pindah keluar daerah, tetapi karena tidak mengurus dokumen kependudukan, namanya masih tercatat di DPT padahal sudah tidak tinggal di TTU. Selain itu, ada juga yang tiba-tiba sakit dan harus berobat keluar daerah. Kalau masih sakit di wilayah TTU biasanya masih bisa diusahakan untuk memilih, tetapi kalau sudah di luar daerah tentu tidak bisa.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tingginya angka golput tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor mobilitas penduduk, kondisi kesehatan, serta lemahnya pembaruan administrasi kependudukan. Banyak masyarakat yang telah berpindah domisili namun belum memperbarui data administrasi sehingga tetap tercatat dalam DPT Kabupaten TTU. Selain itu, faktor situasional seperti sakit dan berada di luar daerah pada hari pemungutan suara

turut menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya. Lebih lanjut, Bawaslu juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa pada pemilu berikutnya. Informan Roswita H.P. Taus, S.E mengungkapkan bahwa:

“Pilkada kali ini relatif masih aman dengan tidak adanya laporan atau temuan yang diproses oleh Bawaslu dan ini kami akan terus berupaya agar menjaga hal ini untuk Pilkada selanjutnya. Saat ini kita sedang berada pada masa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kami sangat berharap masyarakat ikut mengawasi proses ini. Misalnya, ada pemilih yang awalnya memenuhi syarat tetapi kemudian tidak lagi, seperti meninggal dunia, masuk TNI atau Polri, atau dijatuhi pidana dengan hukuman lima tahun ke atas sehingga hak pilihnya dicabut. Dalam kasus seperti itu, masyarakat yang mengetahui bisa melaporkan ke Bawaslu agar akurasi data pemilih lebih terjaga. Sebaliknya, dari status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat juga harus diperhatikan, misalnya warga yang baru genap berusia tujuh belas tahun, pensiunan TNI/Polri, atau yang pindah domisili masuk ke wilayah TTU. Semua perubahan data ini penting untuk dicatat supaya tidak terjadi lagi kasus di mana nama seseorang masih ada di DPT padahal sudah pindah atau tidak lagi memenuhi syarat. Dengan begitu, kita juga bisa menekan potensi tingginya angka golput.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu menempatkan akurasi data pemilih sebagai salah satu langkah strategis dalam menekan angka golput pada pemilu berikutnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih dianggap penting agar data pemilih dapat terus diperbarui sesuai kondisi faktual di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya mengatasi golput tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten TTU, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya angka golput pada Pilkada tahun 2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor kejenuhan politik, mobilitas masyarakat, persoalan administrasi kependudukan, serta kondisi sosial masyarakat. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan pemutakhiran data pemilih. Namun demikian, tingginya angka golput menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam membangun kesadaran politik masyarakat sekaligus memperbaiki sistem administrasi pemilih agar lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

KESIMPULAN

Fenomena golput di Kabupaten Timor Tengah Utara dipengaruhi oleh beragam faktor yang dapat dikategorikan dalam empat tipologi, yaitu golput teknis, golput teknis-politis, golput politis, dan golput ideologis. Golput teknis banyak ditemukan di pedesaan, khususnya Kecamatan Biboki Feotleu, yang dipengaruhi oleh kendala pekerjaan maupun keterbatasan akses. Sementara itu, di perkotaan, khususnya Kecamatan Kota Kefamenanu, fenomena golput lebih beragam dengan munculnya golput teknis-politis, golput politis, hingga golput ideologis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota cenderung lebih kompleks dalam mengekspresikan ketidakikutsertaan politik dibandingkan masyarakat pedesaan.

Partisipasi politik masyarakat juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kota dan desa. Di Kota Kefamenanu, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada sikap apatis dan spektator, tetapi juga terdapat kelompok pengkritik yang aktif menyuarakan pandangan melalui media sosial maupun diskusi langsung. Sebaliknya, di Biboki Feotleu, partisipasi politik lebih sederhana dan terbatas pada sikap apatis serta spektator. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat kota memiliki akses informasi dan dinamika politik yang lebih berkembang, sedangkan masyarakat pedesaan lebih terfokus pada kebutuhan praktis sehari-hari.

Selain itu, temuan dari lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu menunjukkan bahwa peningkatan angka golput juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan administratif. Berdasarkan data dari KPU, terjadi penurunan partisipasi pemilih pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh kejenuhan pemilih setelah Pemilu Nasional, serta permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti pemilih yang secara administratif terdaftar namun secara faktual berada di luar daerah, serta masih tercatatnya pemilih yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Bawaslu menegaskan bahwa faktor golput juga dipengaruhi oleh ketidakhadiran pemilih di TPS, perpindahan domisili tanpa pembaruan data, serta kondisi darurat seperti sakit. Di sisi lain, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, baik secara formal maupun langsung kepada masyarakat, serta mendorong keterlibatan

publik dalam pemutakhiran data pemilih guna meningkatkan akurasi data dan menekan angka golput. Secara umum, fenomena golput dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, administratif, psikologis, maupun ideologis. Faktor struktural dan administratif meliputi keterbatasan akses, pekerjaan, mobilitas penduduk, serta permasalahan data pemilih; faktor psikologis berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap politik dan aktor politik; sedangkan faktor ideologis muncul dalam bentuk penolakan terhadap sistem demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa perilaku politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi praktis, tetapi juga oleh persepsi dan keyakinan yang lebih mendalam, serta didukung oleh kondisi kelembagaan pemilu itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Rajawali Pers Jakarta
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suryanto, S.Sos., M.Si.(2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Setia Bandung.
- Abu Bakar Ebyhara, P. D. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. AR-RUZZ MEDIA.
- TELE;, M., & TELE;, M. (2022). Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020. http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5394&keywords=
- Muhammad Fadel Akbar. (2023). FENOMENA GOLPUT DALAM PILKADA (STUDI TERHADAP RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DI KELURAHAN KEDAUNG, KECAMATAN SAWANGAN, DALAM PILKADA DEPOK 2020). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74671>
- LEDE;, A., & LEDE;, A. (2023). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL SUMBA BARAT PERIODE 2021-2024 (STUDI KASUS GOLPUT DI KECAMATAN LOLI). http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13267
- Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 51-60. Al Faza, F., & Lestari, P. (2020). Sikap Apatis Pemuda terhadap Politik di Dusun Mekarsari Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 51–54. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.26219>
- Nila Sastrawati. (2020). PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12730
- Nuri Mukti yuda Wibawa, Dra.Hermini S, & Drs. Susilo Utomo. (2014). ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2013. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/6423/6201>
- Dokumen Pilkada. "Berita acara dan Rekapitulasi Pilkada 2024". https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/a4df/pilkada/100_DB1_pkwkk_191419_1733474592_aeeb39cf-af2d-4d57-a49c-ef7f78b76a9d.pdf. 21 Januari 2025. 16:00 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024. (2024). KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.
- JDIH KPU. "Surat Tugas Kepala Daerah Terpilih 2015". https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepphp2015/SK%20Kab%20Timor%20Tengah%20Utara.pdf. 21 Januari 2025. 14:38. PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2015. (2015). 151, 10–17.
- KPU."Dokumen Hasil Rekapitulasi Kabupaten" <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/nusa-tenggara-timur/timor-tengah-utara> .

Tautan Online :

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2023). Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Timo Tengah Utara. <https://timortengahutarakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc1IzE=/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ttu.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2023). Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Timor Tengah Utara. <https://timortengahutarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-ttu.html>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (tidak diketahui tanggal). Peta GIS Dukcapil. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- P2K Universitas STEKOM. Kabupaten Timor Tengah Utara. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Timor_Tengah_Utara
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024, 29 Agustus). Luas dan batas wilayah administrasi. <https://ttukab.go.id/profil-daerah/luas-dan-batas-wilayah-administrasi/>